

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMDA KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Muhammad Fahmi ¹⁾, Karin Yudha Ningrum ^{2*)}, Dina Mariana ³⁾, & Urai Achmad Rivaldi ⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Tanjungpura
*Corresponding Author
email: karinyudha.ningrum@gmail.com

Abstract

The amount of local own-source revenue (PAD) in recent years has fluctuated, this is due to the local government's lack of attention in developing the potential to obtain regional sources of income other than regional taxes. The population and sample size in this study were 14 cities/regencies in West Kalimantan Province for more than 5 years, from 2018 to 2022. This study employs a descriptive quantitative approach with statistical analysis techniques, specifically SPSS version 25. The findings revealed that the independent variable represented by X1 has a significance of $0.000 < 0.05$, implying that PAD has a significant and positive influence on the regional government's financial performance as the dependent variable. Capital expenditure is denoted as X2 and has a $0.005 < 0.05$ significance, implying that it has a significant positive impact on the local government's financial performance as the dependent variable. Thus, the F test results in this study suggest that PAD and capital expenditure are independent variables that have a strong influence on the financial performance of local governments as the dependent variable, represented by (Y).

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Capital Expenditures, Regional Financial*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah selanjutnya dikenal dengan PAD merupakan sumber penerimaan yang diperoleh setiap daerah seluruh kabupaten/kota pada Provinsi di Indonesia guna memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan wewenangnya untuk meningkatkan potensi suatu daerah. Dapat dikatakan telah mandiri apabila suatu daerah dengan melihat aktivitas di bidang perekonomiannya mampu meningkatkan PAD (Putri & Darmayanti, 2019). PAD memberikan peranan penting pada sektor pembangunan di daerah serta menjadikan suatu daerah tersebut tidak bergantung pada pusat (Nauw, 2021). Sehingga, UU Nomor 33 Tahun 2004 menjadi pedoman

untuk mengatur dana Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kalimantan Barat (Kalbar) wilayah di Indonesia yang menjalankan otonomi daerah. Dimana Otonomi daerah di Kalbar telah mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemda. Sebagai Provinsi menganut otonom daerah, Kalimantan Barat memiliki wewenang yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus urusan di tingkat lokal. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayahnya. Otonomi daerah Kalimantan Barat memberikan kebebasan kepada pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan dan peraturan daerah berdasarkan dengan kebutuhan dan

karakteristik setiap daerah. Ini termasuk pengelolaan sumber daya alam, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pariwisata dan lingkungan.

Selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Kalbar juga memiliki kewenangan lebih besar dalam urusan regulasi dan administrasi di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab atas pembangunan dan pelayanan publik di bidangnya masing-masing dengan acuan dari kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pusat. Otonomi daerah di Kalimantan Barat bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, pelayanan publik yang berkualitas dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan otonomi daerah diharapkan potensi daerah dapat dimanfaatkan dengan optimal demi meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Kinerja Keuangan Pemda telah tercermin dari peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah. Kemampuan dalam memanfaatkan potensi suatu daerah sehingga memberikan dampak ekonomis terhadap pertumbuhan sumber penerimaan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintahan daerah (Prastiwi & Aji, 2020). Meningkatnya PAD menunjukkan peningkatan kemampuan PEMDA dalam menghasilkan pendapatan sendiri, yang dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Selain itu, efisiensi belanja daerah juga menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat Kinerja Keuangan Pemda. Dapat garis bawahi bahwa efisiensi pembelanjaan daerah berarti membelanjakan anggaran secara lebih efektif dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan penggunaannya tepat sasaran. Jika pembelanjaan menjadi efisien, pemerintah daerah mendapatkan manfaat paling besar

dari setiap unit pembelanjaan yang digunakan.

Upaya Penambahan PAD dan efisiensi belanja daerah menjadi tujuan penting untuk menaikkan kinerja suatu keuangan PEMDA. Kedua aspek itu berkontribusi dalam kesinambungan keuangan daerah, mengembangkan kapasitas pembiayaan, dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain PAD dan Belanja Modal, terdapat beberapa aspek lain yang dapat mempengaruhi kinerja suatu keuangan PEMDA, antara lain: Pemandangan Dana Pemerintah Pusat kepada PEMDA dengan dana perimbangan. Efisiensi serta Pengelolaan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pengaruh Kebijakan Nasional, Risiko Bencana Alam, Pengelolaan Utang, Keberlanjutan Keuangan dll. Namun dalam artikel ini peneliti hanya mengambil dua faktor, faktor tersebut adalah PAD dan Belanja Modal.

PAD merupakan satu dari sekian banyak penghasilan yang diterima suatu daerah sesuai kemampuan dari masing-masing daerahnya yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di setiap pemda dan melaksanakan pembangunan daerah. PAD adalah faktor penting dalam upaya mewujudkan kemandirian suatu daerah. Dapat diketahui bahwa PAD merupakan sumber pendanaan bagi suatu daerah. Pendanaan pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dapat dipergunakan untuk mandat pemerintah dan pembangunan. Kemandirian dalam pengelolaan PAD dari daerah akan berdampak baik pada kemandirian dari suatu daerah dalam pengalokasikan APBD.

Belanja Modal adalah anggaran yang dijadikan sebagai aset secara tetap, biasanya dilaksanakan oleh otoritas publik yang di terima pemerintah daerah melalui belanja modal (Nordawan, D., &

Hertianti, A. (2006) dalam Atmoko & Khairudin, (2022). Belanja modal digunakan untuk pengadaan peralatan, pelaksanaan pembangunan dan infrastruktur, serta sumber daya yang ada. Umumnya komponen belanja modal yang digunakan di tingkat provinsi berkisar antara 5% - 20% (Mahmudi, (2010) dalam Atmoko & Khairudin, 2022).

Keuangan daerah memainkan peran penting dalam manajemen administrasi pemerintah daerah. Jika pemerintah di daerah memiliki keuangan yang baik, maka terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam daerah akan lebih mudah tercapai. Indikator suatu keuangan pemerintah yang baik adalah PAD, tingkat kemandirian dalam mengurus daerah, dll. Akan tetapi, jika pengelolaan keuangan suatu daerah tidak dilakukan, tidak mungkin keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Untuk memperoleh pengelolaan fiskal daerah yang baik, perlu dilakukan analisis serta evaluasi terhadap ukuran standar kinerja fiskal pemerintah daerah, yaitu mengkaji faktor - faktor dari kesenjangan yang signifikan dalam pemaksimalan fiskal suatu daerah. Hal ini sangat dibutuhkan sebab hasil dari pengukuran kinerja suatu keuangan dapat memberikan sudut pandang tambahan dalam proses pengelola keuangan daerah demi meningkatkan kualitas dari keuangan daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian dari pengaruh PAD dan belanja modal kepada kinerja keuangan PEMDA, mengemukakan perbedaan. (Digidowiseiso et al., 2022) dalam penelitiannya mengatakan PAD dan Belanja Modal memiliki positif signifikan kepada kinerja suatu keuangan pemda. Selanjutnya, (Lathifa & Haryanto, 2019) dalam hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja suatu keuangan pemda. Namun, Belanja Modal hanya berdampak

positif tidak signifikan terhadap kinerja suatu keuangan Pemda.

Perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan pada : kabupaten/kota : Mempawah, Kuburaya, Kayong Utara, Sambas, Sanggau dan Kota Singkawang serta Kota Pontianak. Selanjutnya di tahun 2022 PAD terjadi penurunan pada kabupaten Landak, Bengkayang, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau dan Melawi.

Disini terjadi jumlah PAD beberapa tahun terakhir mengalami naik turun di setiap Kabupaten/Kota. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi atau kemampuan untuk mendapatkan sumber pendapatan daerah, selain pajak daerah yang cukup beraneka ragam, namun hanya segelintir yang bisa dipergunakan sebagai sumber penerimaan, dan pemerintah daerah masih beranggapan terkait rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan menjadi salah satu faktor penyebab PAD di Kota/Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat tidak mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini merumuskan: apakah PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan PEMDA? dan apakah Belanja Modal juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan PEMDA?

2. KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja Keuangan PEMDA

Kinerja keuangan pada Pemda dapat digunakan untuk mengetahui nilai dan menentukan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban dan kewenangannya. Selain itu, Kinerja Keuangan Pemda juga dapat dijadikan

acuan pengambilan keputusan untuk menentukan derajat pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan, sehingga kualitas sektor publik semakin baik. Hal ini sejalan dengan (Mahsun, M. (2006) dalam Sari & Wati, 2021) mereka berpendapat bahwa kinerja suatu keuangan pemda adalah ilustrasi dari seluruh tingkat pengelolaan keuangan yang dicapai untuk melaksanakan aktifitas perencanaan kebijakan demi mencapai visi dan misi, sasaran, serta tujuan dari pemerintah daerah. Menurut (Halim, A. (2004) dalam Digdowiseiso et al., 2022) menjelaskan bahwa kinerja suatu keuangan pemda adalah tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan pemda melaksanakan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah

UU Pasal 1 (18) Nomor 33 Tahun 2004 merupakan pendapatan diterima daerah hasil pemungutan daripada Perda dan perundang-undangan. Sebagai daerah otonom besaran PAD harus terus ditingkatkan secara mandiri guna mendanai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat suatu daerah (Heryanti et al., 2019). Dijelaskan oleh (Halim, A. (2007) dalam Wahyudi Ihsan, 2020), PAD yang diperoleh suatu daerah dari hasil sumber daya yang dimiliki wilayahnya.

Adapun, jenis pendapatan diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31 (1), sumber yang utama suatu daerah berasal daripada Pajak dan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah. Penghasilan yang diperoleh dengan menggunakan kemampuan wilayah tersebut didasari Perda dan Undang-Undang yang berlaku. Disimpulkan bahwa PAD adalah Penghasilan yang dimana didapat dengan memanfaatkan kemampuan penghasilan di suatu wilayah berdasarkan Perda dan Perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal yaitu hasil daripada keuangan telah dianggarkan guna memperoleh aktiva tetap dan lainnya yang memberikan suatu dampak baik selama 1 periode lebih akuntansi. Terdapat 4 kategori akuntansi di dalam Belanja Modal: (1) Tanah, (2) Gedung serta bangunan, (3) Alat, dan (4) Aset yang tidak berwujud. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa wujud dari anggaran belanja modal dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan sejumlah dana APBD, yang kemudian digunakan dalam menambah aset tetap. Bila menggunakan anggaran yang berasal dari belanja modal, dalam hal ini juga berfungsi sebagai fungsi pemerintah dan fasilitas umum, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur dan pelayanan.

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan PEMDA

Adapun PAD mengacu pada penghasilan yang di peroleh suatu daerah melalui pengambil alihan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Sedangkan untuk PAD, pada Pasal 1 (18) UU No. 33 Tahun 2004 mengatur keuangan yang sama terhadap pemerintahan di pusat dengan daerah, bahwa penerimaan diterima daerah sesuai dengan Perda. PAD berasal dari pendapatan yang menjadi tanggung jawab PEMDA untuk mengelola pendapatannya, bahkan PAD mempunyai manfaat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan. Hal ini secara jelas menyatakan bahwa jumlah besaran pada PAD pada APBD yang semakin tinggi, akan semakin kecil ketergantungan dari pemerintah pusat hingga berdampak pada meningkatnya kualitas kinerja suatu keuangan daerah. Sesuai penelitian oleh (Digdowiseiso et al., 2022) yang menunjukkan tinggi rendahnya pendapatan utama daerah berdampak pada

kinerja fiskal pemda, berdasarkan penelitian diatas maka hipotesis rumusannya adalah :

H1 : PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan PEMDA.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan PEMDA

Investasi digunakan dalam penggunaan pada belanja modal yang dirancang untuk memberi manfaat berupa pelayanan untuk masyarakat baik langsung atau tidak langsung. Belanja modal yang banyak dapat menjelaskan bahwa banyak infrastruktur dan fasilitas telah dibangun. Maka kesimpulannya adalah besar pembangunan yang dilakukan maka semakin pula meningkat kinerja fiskal yang diperoleh Pemda. Hal ini sesuai dengan penelitian (Lathifa & Haryanto, 2019) maka secara belanja modal berdampak pada kinerja suatu keuangan pemda. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka rumusan hipotesisnya adalah:

H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan PEMDA.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Dapat dibuktikan dengan hal pertama, peneliti harus menentukan antar dua variabel. Hal pendekatan secara kuantitatif deskriptif tersebut yang merupakan dasar dalam penelitian ini nantinya akan dihubungkan dengan teori yang sudah ada dan telah didapatkan. Dalam penelitian ini, variabel independen disimbolkan dengan huruf (X) dimana dapat dijelaskan sebagai PAD dengan simbol (X1) dan belanja modal dengan simbol (X2). Sedangkan, untuk kinerja keuangan PEMDA variabel dependen disimbolkan dengan huruf (Y).

Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan jenis eksplanatori yang menyatakan bahwa menggambarkan adanya hubungan antar variabel yang disebabkan oleh pengaruh dari keadaan dan suatu kejadian secara fakta (Darwin et al., 2021).

Populasi

Menjelaskan bahwa populasi merupakan jumlah data berupa subjek dan objek yang secara keseluruhannya mempunyai perbedaan yang akan dimanfaatkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya untuk menentukan suatu keputusan akhir yang akan diambil (Darwin et al., 2021). Adapun lokasi yang digunakan dan dapat dijadikan sebagai populasi terdiri dari 14 wilayah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Sampel

Menjelaskan bahwa sampel merupakan salah satu bagian yang termasuk kedalam populasi yang memiliki ciri-ciri dan jumlah dengan menggunakan sampling sebagai tahap teknik dalam melakukan penelitian (Darwin et al., 2021). Menggunakan data dengan rentang waktu selama 5 tahun, yaitu dari 2018-2022.

Sumber Data

Data sekunder berupa laporan keuangan dilengkapi dengan pengumpulan data observasi non partisipan, yaitu hanya mengamati suatu data pada APBD pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Mengakses laman situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melakukan pengumpulan berbagai informasi data, seperti laporan keuangan.

Definisi Operasional Variabel

PAD dan Belanja Modal sebagai variabel yang independen atau bebas dan Kinerja Keuangan PEMDA sebagai variabel yang dependen atau terikat.

a. Kinerja Keuangan PEMDA

Indikator yang digunakan untuk mendapatkan hasil kinerja dari PEMDA dalam menjalankan aktivitas keuangannya sesuai ketentuan UU.

Derajat desentralisasi = $\text{PAD} / \text{TOTAL PENDAPATAN} * 100\%$

Rasio dapat dipergunakan dalam mengukur kemampuan pada Pemda dalam upaya menaikkan pendapatan asli (Arianda et al., 2014).

b. Pendapatan Asli Daerah

Sumber penghasilan didapatkan berasal dari hasil pemberdayaan potensi pada suatu daerah mengacu pada perundang – undang yang berlaku dengan menggunakan rasio. Untuk menghitung tersebut, maka menggunakan:

JHPD : Jumlah Hasil Pada Pajak Daerah

JHRD : Jumlah Hasil Pada Retribusi Daerah

JHPKD : Jumlah Hasil Pada Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

JHLPADS: Jumlah Hasil Pada Lain-lain PAD yang Sah

Dengan Rumus:

$\text{PAD} = \text{HPD} + \text{HRD} + \text{HPKD} + \text{HLPADS}$

c. Belanja Modal

Kegiatan Pemerintah daerah melakukan pembiayaan pengeluaran guna mencapai suatu tujuan untuk mendapat aset secara tetap dan lainnya yang tentunya memiliki suatu manfaat selama 12 bulan atau lebih.

Rumus Menghitung Belanja Modal:

TPT : Total Perolehan Tanah

TGB : Total Gedung & Bangunan

TP : Total Peralatan

TATB : Total Aset Tak Berwujud

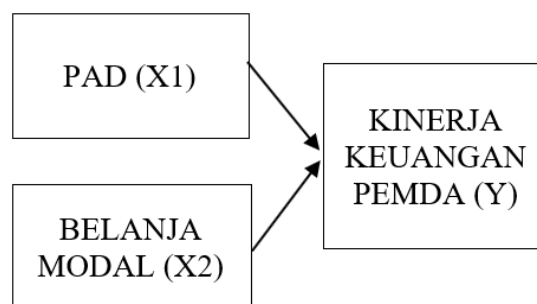
$\text{Belanja Modal} = \text{TPT} + \text{TGB} + \text{TP} + \text{TP} + \text{TATB}$

Teknik Menganalisis

Menggunakan teknik analisis statistik dengan spss versi 25 sebagai alat bagi peneliti untuk mengetahui signifikansi hubungan atau pengaruh antar variabel. Sehingga, dengan adanya analisis statistik digunakan sebagai acuan untuk memulai penelitian dimana membangun hipotesis yang diajukan.

Kerangka Berpikir

Penelitian juga menggunakan kerangka berpikir untuk dasar model konseptual oleh peneliti dengan menghubungkan teori dan variabel-variabel yang digunakan guna bertujuan untuk mengetahui penyebab atau indikator permasalahan yang terjadi dalam penelitian, kemudian dapat dikemukakan ke dalam bagan. Berikut ini adalah bagan yang dimasukkan ke dalam penelitian:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

4. HASIL

Analisa Statistik Deskriptif

Adapun analisa pada statistik deskriptif penggunaannya berfungsi menjelaskan mengenai hasil data dalam penelitian dari perhitungan yang telah dilakukan sehingga menghasilkan uji statistik deskriptif dari PAD (X1), BELANJA MODAL (X2), dan KINERJA KEUANGAN PEMDA, sebagai berikut.

Tabel 1. Analisa Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	70	23.96	27.01	25.3693	.73373
BELANJA MODAL (X2)	70	25.26	27.27	26.2032	.42347
KINERJA KEUANGAN PEMDA	70	.03	.32	.0943	.06454
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dalam tabel 1 analisa secara menjelaskan data deskriptif yang sah untuk diproses ke dalam perhitungan pada penelitian ini adalah 70 sampel. Pada variabel PAD (X1) diketahui rata-rata nilai nya adalah sebesar 25,3693 dan standar deviasi nya adalah sebesar 0,73373 dengan memiliki hasil minimum nya adalah sebesar 23,96 dan hasil maksimum nya adalah sebesar 27,01. Selanjutnya, pada variabel BELANJA MODAL (X2) diketahui rata-rata nilai nya adalah sebesar 26,2032 dan standar deviasi nya adalah sebesar 0,42347 dengan memiliki hasil minimum nya adalah sebesar 25,26 dan hasil maksimum nya adalah sebesar 27,27. Serta, pada variabel KINERJA KEUANGAN PEMDA diketahui rerata nilainya 0,0943 dan standar deviasi nya adalah 0,06454 memiliki hasil minimum nya adalah sebesar 0,03 dan hasil maksimum nya adalah sebesar 0,32.

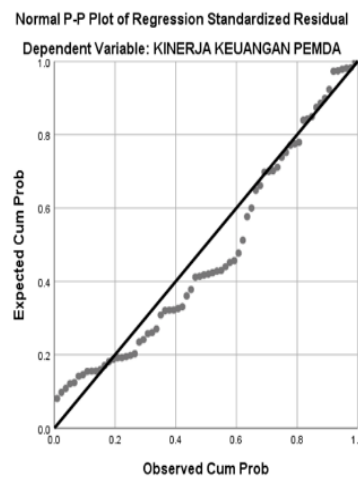
Uji Asumsi Klasik

Dalam hal menguji kepatutan suatu data penelitian supaya dapat menghasilkan estimator yang tidak bias. Maka, untuk menghasilkan data penelitian yang tidak bias harus dapat memenuhi empat asumsi dasar, diantaranya uji data normalitas, uji data multikolonieritas, uji data autokorelasi, dan uji data heteroskedastisitas.

a. Menguji Normalitas

Dalam menguji normalnya digunakan bertujuan untuk menilai adanya data penelitian terdapat variabel sebagai pengganggu atau variabel sebagai residual

yang di distribusikan. Dengan ini menggunakan pengujian secara normalitas yang dilakukan dengan menganalisa grafik yang menunjukkan pola pada penelitian yang tersebar sesuai arah di sekitar garis, sehingga dapat secara jelas menyatakan data uji.



Gambar 2. Analisis Grafik

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Tabel 2. Pengujian Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03524497
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.144
	Negative	-.080
Test Statistic		.144
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Adapun dalam tabel 2 pengujian dengan sebesar 0,001. Dapat dinyatakan data telah terdistribusi secara normal. Dimana hasil nilai Kolmogorov-Smirnov berada diatas nilai signifikasi yaitu 0,05.

b. Uji Multikolonieritas

Pengujian ini dilakukan guna bertujuan untuk menilai ada tidaknya temuan yang memiliki korelasi antar variabel independen (bebas) (Ghozali, 2018).

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.077	.268		-4.025	.000		
PAD (X1)	.086	.008	.973	11.309	.000	.601	1.663
BELANJA MODAL (X2)	-.038	.013	-.250	-2.910	.005	.601	1.663

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Pengujian dalam multikoloniaritas pada variabel dependen menjelaskan bahwa PAD (X1) dan Belanja Modal (X2) dengan tolerance sebesar 0,601 dan memiliki hasil VIF sebesar 1,663. Data pada tabel 3 memiliki nilai normal.

c. Pengujian Autokorelasi

Adanya pengujian autokorelasi terjadi karena adanya kesalahan pengganggu (residual) pada data penelitian, tetapi data penelitian yang bagus merupakan bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2018). Metoda ini sering digunakan pada data model regresi yang bersifat runtun waktu atau time series.

Tabel 4. Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.838 ^a	.702	.693	.03577	2.345

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Pada tabel 1.4 menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) dapat dikemukakan dalam perhitungan, dimana hasil nilai $N = 70$, nilai $K = 2$, nilai $d_l = 1,5542$, nilai $4 - d_l = 2,4458$, nilai $d_u = 1,6715$, dan nilai $4 - d_u = 2,3285$, sehingga didapat nilai Durbin Watson = 2,345 selanjutnya didapat data model regresi terdistribusi secara normal karena berada di posisi yang tidak terjadi adanya autokorelasi.

d. Pengujian Heteroskedastisitas

Model suatu data yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas melainkan adalah homoskedastisitas (Ghozali, 2018). Selanjutnya uji Glejser

yang menilai ada atau tidak nya heteroskedastisitas.

Tabel 5. Pengujian Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-.331	.119		-2.780	.007
PAD (X1)	.019	.003	.687	5.615	.325
BELANJA MODAL (X2)	-.005	.006	-.096	-.785	.435

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dijelaskan data tabel 5 signifikasi pada variabel independen, (X1) = 0,325 dan BELANJA MODAL (X2) sebesar 0,435. Sehingga, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kedua nilai variabel independen ini berada diatas nilai signifikansi sebesar 0,05 dapat dinyatakan data model regresi pada tabel 5 tidak mengalami heteroskedastisitas.

Analisa Regresi Berganda

Disini akan dihitung hubungan antara PAD (X1) dan BELANJA MODAL (X2) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah. Sehingga menganalisis data regresi didapat:

Tabel 6. Analisa Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-1.077	.268		-4.025	.000
PAD (X1)	.086	.008	.973	11.309	.000
BELANJA MODAL (X2)	-.038	.013	-.250	-2.910	.005

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Pada perhitungan di dapatkan persamaan pada regresi, sebagai berikut:

$$Y = -1.077 + 0.086X_1 - 0.038X_2 + e$$

Dalam tabel 1.6 di atas dapat disimpulkan hasil konstantanya sebesar -1.077 diartikan jika variabel tersebut independen dihitung 0, maka variabel dependen = -1.077. Selanjutnya, dalam koefisien data pada variabel independen, yaitu PAD (X1) = 0.086; maksudnya pada variabel independen lain mengalami

peningkatan 1%, maka kinerja keuangan pemda juga akan meningkat 0.086. Mempunyai korelasi antara PAD dengan kinerja keuangan pemda dimana semakin adanya peningkatan PAD maka semakin meningkat pula kemampuan keuangan pemda. Dari tabel 1.6 variabel independen, yaitu BELANJA MODAL (X2) = -0.038; artinya pada kinerja keuangan pemda (Y) juga mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan turun menjadi 0.038.

Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Signifikansi (Uji - F)

Dalam melakukan uji signifikan atau lebih dikenal sebagai simultan F dapat menilai sampai sejauh mana hubungan variabel (X) terhadap variabel (Y).

Tabel 7. Pengujian Signifikansi

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.202	2	.101	78.833	.000 ^b
	Residual	.086	67	.001		
	Total	.287	69			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Di mana analisis uji simultan dari tabel 7 yang telah dilakukan menjelaskan bahwa nilai hitung pada F sebesar 78.833 dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0.000. Disimpulkan pada hipotesis penelitian ini telah diterima karena memiliki pengaruh serta signifikan antara PAD dan BELANJA MODAL terhadap Kinerja Keuangan Pemda secara simultan atau bersama-sama di Pemerintah daerah. Disini dapat dibuktikan adanya hasil hubungan < nilai probabilitas yaitu 0.05 sesuai dengan ketentuan pada uji F.

Pengujian Signifikansi Parsial (Uji - T)

Adapun dalam penggunaan uji t berguna mendapat nilai secara variabel independen dengan dependen yang berpengaruh.

Tabel 8. Pengujian Signifikansi Parsial (Uji - t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-1.077	.268		-4.025	.000
	PAD (X1)	.086	.008	.973	11.309	.000
	BELANJA MODAL (X2)	-.038	.013	-.250	-2.910	.005

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dan tabel 8 uji hipotesis t didapat:

Jika PAD sebagai variabel independen, yaitu X1 memiliki hasil nilai signifikansi sebesar 0.000, maka dapat dinyatakan PAD akan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemda secara signifikan.

Variabel Belanja Modal sebagai variabel independen, yaitu X2 memiliki hasil nilai signifikansi sebesar 0.005, sehingga didapatkan nilai belanja modal akan signifikan dengan Kinerja Keuangan di Pemerintah daerah, dikarenakan memiliki nilai < dari 0.05.

Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Jika penelitian ini menggunakan uji yang disimbolkan dengan (R²) dimana berfungsi menilai hubungan variabel pada X dan variabel pada Y dari model data.

Tabel 9. Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.838 ^a	.702	.693	.03577	.345

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 25

Dari tabel 9 menunjukkan perhitungan hasil R square = 0.702 atau sebesar 70.2%, artinya adalah PAD dan belanja modal memiliki pemengaruh dengan kinerja keuangan Pemda. Sementara untuk sisanya sebesar 0.298 atau sebesar 29.8% terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

5. PEMBAHASAN

Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemda

Hipotesis dalam uji t di mana telah dilakukan pada penelitian ini menjelaskan PAD yakni variabel independen yang disimbolkan dengan X1 memiliki signifikansi = $0.000 < 0.05$ diartikan PAD memiliki pengaruh positif signifikan dengan kinerja keuangan pemda sebagai variabel dependen.

Sesuai peneliti dahulu telah dilakukan (Sari & Wati, 2021) yang menjelaskan PAD dipengaruhi signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Terdapat peranan penting berasal dari PAD karena digunakan untuk mengukur potensi yang dimiliki daerah (Nauw, 2021).

Bahkan, menurut (Heryanti et al., 2019) PAD dapat digunakan untuk kepentingan bagi masyarakat yang berdampak khususnya dibidang pelayanan sehingga menunjang pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk mandiri sehingga tidak memiliki ketergantungan dengan pemerintah di pusat.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemda

Dalam hipotesis uji t menjelaskan jika belanja modal sebagai variabel independen yang disimbolkan dengan X2 memiliki signifikansi = $0.005 < 0.05$ diartikan yaitu berpengaruh dengan signifikan serta positif terhadap kinerja keuangan pemda sebagai variabel dependen.

Adapun hal ini sama dengan penelitian dari (Lathifa & Haryanto, 2019) bahwa belanja modal terdapat pemengaruh signifikan serta positif dengan kinerja keuangan pemda. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai alat penentuan untuk mengukur kinerja keuangan pemda dimana penggunaan pada belanja modal oleh pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas, fasilitas

dan kemampuan dalam peningkatan pendapatan daerah guna mencapai kualitas kinerja keuangan pemerintah yang baik (Digdowiseiso et al., 2022).

Sejalan dengan pernyataan (Andirfa et al., 2016) mengemukakan bahwa belanja modal digunakan oleh pemerintah daerah mengutamakan infrastruktur yang berkualitas untuk dirasakan oleh masyarakat guna meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor serta meningkatkan produktivitas dalam masyarakat yang sejahtera.

6. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah diolah dan dimasukkan oleh peneliti ke dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan, di antaranya:

1. Dalam hasil uji F pada penelitian ini mengemukakan PAD dapat disimbolkan dengan (X1) dan belanja modal yang disimbolkan (X2) dimana termasuk ke dalam variabel independen secara memiliki pengaruh kuat pada kinerja keuangan pemda sebagai variabel dependen yang disimbolkan dengan (Y).
2. Dalam menguji variabel independen, yaitu PAD sebagai (X1) pada penelitian menjelaskan terdapat korelasi yang positif namun signifikan terhadap kinerja keuangan pemda sebagai variabel dependen di Pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018-2022. Sehingga, dengan kata lain H1 pada hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini telah diterima.
3. Dalam menguji variabel independen, yaitu belanja modal sebagai (X2) pada penelitian ini menjelaskan pengaruh secara positif serta secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemda sebagai variabel dependen. Hingga,

H2 pada hipotesis penelitian yang dikemukakan ini telah diterima.

Implikasi

Adapun data yang telah diolah dan dimasukkan oleh peneliti kedalam penelitian ini, menunjukkan adanya implikasi yang diberikan. Berikut ini adalah implikasi yang terdapat didalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Diharapkan agar setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan mengelola dan memanfaatkan potensi masing-masing daerah seperti PAD dan belanja modal secara optimal serta lebih baik lagi kedepannya dengan merata guna lebih meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerahnya masing-masing.
2. Selanjutnya kedepan untuk kesempurnaan penelitian diharapkan menambah serta menggunakan variabel independen dan indikator rasio lainnya dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kedepannya.

Keterbatasan

Adapun kami sebagai peneliti memiliki keterbatasan, di antaranya:

1. Hanya menggunakan satu indikator rasio saja untuk mengukur variabel dependen.
2. Penggunaan dua variabel independen seperti variabel PAD dan variabel belanja modal untuk menilai ada atau tidaknya pengaruh yang di miliki variabel independen.

7. REFERENSI

- Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., & Ec, M. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan*. 30–38.
- Atmoko, C. A., & Khairudin, K. (2022). Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 291–296. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1295>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (T. S. Tambunan (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25695>
- Nauw, E. T. (2021). Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 33, 68 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004#:~:text=Undang-Undang Nomor 33 tahun,Hasil diatur dengan Peraturan Pemerintah.>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 85, 460. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Sari, B. I., & Wati, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356>
- Wahyudi Ihsan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.
- Widyaningsih, A., & Sani, S. (2020). The Analysis Potency of Animal Slaughterhouse Retribution and Its Contribution for Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pontianak City. *Eksos*, 15(1), 65-76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/eksos.v15i1.83>